



Vol. 5 No. 1, April 2023 | 59-...
Journal of Religion and Public Health
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jrph/index>



Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara Tahun 2022

Evaluation Of The Implementation of PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara's Mining Safety Management System In 2022

^{1*}Sulfikar, ¹Abdullah Syafei

Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju

*corresponding author: sulfikar91@gmail.com

Article Info

Article History

Submitted

01 Juli 2022

Accepted

04 Oktober 2022

Published

01 April 2023

Keywords Mining Safety, Mining Safety Management System, Evaluation

Abstract

The mining safety management system is an important aspect that needs to be considered in mining companies, because the success of the company's production is also determined by worker safety. In Indonesia, the Mining Safety Management System (SMKP) must be implemented by mining companies and mining service companies, in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 26 of 2018. This regulation aims to evaluate the effectiveness of planned, measurable, structured and integrated mining safety management. This research aims to evaluate the implementation of the Mining Safety Management System at PT Pesona Khatulistiwa Nusantara in 2022 using primary data and secondary data. Primary data was collected through observation, interviews and documentation. The informants in this research were 2 SHES Managers and SHS Superintendents, 3 Operation Division managers, 3 field personnel from each business activity area of PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Secondary data was collected from various sources such as academic literature, government regulations related to mining safety, accident or inspection reports, company policies, and internal documents of PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. The results of the research show that the implementation of the Mining Safety Management System at PT Pesona Khatulistiwa Nusantara has not yet been completed in accordance with the Decree of the Director General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 185.K/37.04/DJB/2019, there are still several elements that have not been implemented or are even still in process and are not yet running properly. planning that is not yet in accordance with the conditions and programs set, organizational and personnel elements that have not been socialized optimally, implementation elements that have not all been implemented, monitoring, evaluation and follow-up elements that still have deficiencies, documentation elements that have not all been socialized, and management review elements the implementation of which does not yet involve the company's highest leadership and has not been carried out in a planned manner.

Sistem manajemen keselamatan pertambangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perusahaan pertambangan, karena keberhasilan

Kata Kunci
Keselamatan
Pertambangan,
Sistem Manajemen
Keselamatan
Pertambangan,
Evaluasi

produksi perusahaan juga ditentukan oleh keselamatan pekerja. Di Indonesia, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) wajib diterapkan oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen keselamatan pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara pada tahun 2022 menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah SHES Manager dan Superintendent SHS sebanyak 2 orang, manager Divisi Operation sebanyak 3 orang, personel lapangan masing-masing area kegiatan usaha PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebanyak 3 orang. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti literatur akademik, peraturan pemerintah terkait keselamatan pertambangan, laporan kecelakaan atau inspeksi, kebijakan perusahaan, dan dokumen internal PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara belum sempurna dilakukan berdasarkan KepDirJen Minerba Kementerian ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019, masih terdapat beberapa elemen yang belum terlaksana atau bahkan masih dalam proses dan belum berjalan seperti elemen perencanaan yang belum sesuai kondisi dan program yang ditetapkan, elemen organisasi dan personel yang belum disosialisasikan optimal, elemen implementasi yang belum semua diterapkan, elemen pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut yang masih terdapat kekurangan, elemen dokumentasi masih belum semua disosialisasikan, dan elemen tinjauan manajemen yang pelaksanaannya belum melibatkan pimpinan tertinggi perusahaan dan belum dilakukan secara terencana.

Latar Belakang

Sistem manajemen keselamatan pertambangan merupakan aspek penting dalam operasional suatu perusahaan pertambangan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai produksi yang efektif dan efisien sangat bergantung pada keselamatan kerja karyawan di lingkungan pertambangan. Kondisi dan tindakan yang tidak aman dalam aktivitas pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan peralatan, cedera, bahkan kematian yang tentunya dapat menghambat produksi. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan menjadi suatu keharusan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari ancaman bahaya.

Di Indonesia, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dalam industri pertambangan diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2018. Peraturan ini mewajibkan perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan untuk menerapkan SMKP Minerba. Tujuan utama dari SMKP Minerba adalah meningkatkan efek kesiapan manajemen keselamatan pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam industri pertambangan, menjadi aspek penting dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan yang baik. Peraturan ini didukung oleh Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah memberikan payung hukum yang kuat untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.

Penelitian sebelumnya oleh Firdaus (2021) terkait penerapan poin elemen SMKP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 di PT. Djawa Berkah Mineral menunjukkan evaluasi dan implementasi penerapan yang sudah dilakukan, walaupun ada beberapa poin-poin yang masih belum diterapkan. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat kategori temuan minor, adalah ketidaksesuaian ketentuan perundangan dan poin acuan lainnya dan belumnya meninjau dokumen secara berkala setiap tahunnya. Total poin Kriteria matriks GAP analysis pencapaian penerapan SMKP Minerba mendapat pencapaian pada 7 elemen dengan presentase 70%. Adanya pengendalian resiko keselamatan operasi pertambangan untuk menjamin dan melindungi perkerja tambang agar selamat dan sehat dalam melakukan kegiatan oprasional pertambangan.

Penelitian lainnya oleh Pratama (2022) terkait penerapan poin elemen SMKP menyebutkan bahwa dari analisis data terdapat 7 elemen meliputi, elemen Kebijakan dengan presentase 76,5%, elemen Perencanaan dengan presentase 71,8%, elemen Organisasi dan Personel dengan presentase 62,7%, elemen Implementasi dengan presentase 79,4%, elemen Evaluasi dan Tindak Lanjut dengan presentase 78,3%, elemen Dokumentasi dengan presentase 80,9%, dan elemen Tinjauan Manajemen dengan presentase 70,0%. Dari hasil ketentuan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba di dapati bahwa PT. Satria Bahana Sarana mendapatkan sertifikat perunggu dari penilaian audit SMKP Minerba dengan total presentase yang di capai yaitu 74,2%.

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki izin Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan nomor kontrak 1272.K/30/DJB/2011. Perusahaan ini memiliki luas areal pertambangan seluas 21.875 Ha dan berlokasi di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Masa berlaku izin perusahaan ini adalah

sampai dengan tanggal 14 Februari 2039.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah menerapkan dan melakukan audit internal terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan pada PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dalam tahun 2022.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat diketahui secara mendalam mengenai implementasi dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di perusahaan tersebut. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan pertambangan.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data yang detail dan mendalam tentang kebijakan, prosedur, praktik, dan persepsi yang ada dalam perusahaan. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks penggunaan SMKP di perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara yaitu kuesioner untuk menggali informasi terkait pemahaman, penerapan, dan persepsi karyawan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di perusahaan, observasi lembar observasi untuk mengamati langsung praktek dan kondisi di lapangan terkait penerapan keselamatan pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, dan pedoman wawancara yang digunakan untuk wawancara dengan dengan pihak terkait di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, seperti manajemen, supervisor, dan karyawan yang terlibat langsung dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kebijakan, prosedur, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem keselamatan. Selain itu juga digunakan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti kebijakan keselamatan, prosedur operasional, laporan inspeksi, laporan kecelakaan, dan dokumen lain yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di perusahaan.

Pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dalam beberapa cara yaitu wawancara terhadap personel yang sesuai dilokasi kerja dengan menggunakan pertanyaan bersifat objektif, kemudian merangkum dan meninjau ulang hasil wawancara terhadap personil yang diwawancarai, telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen data sekunder ini diperoleh melalui telaah data kebijakan, data perencanaan, data organisasi dan personel, data implementasi, data pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, data dokumentasi, dan data tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja, dan observasi untuk mengamati kondisi sebenarnya dan kesesuaian antara jawaban yang diberikan informan dengan keadaan yang sesungguhnya.

Pemilihan informan sebagai sumber informasi pada kegiatan wawancara dipenelitian ini adalah didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan pada penelitian ini terdiri dari informan

kunci (IK) yaitu *SHES Manager* dan *Superintendent SHS* sebanyak 2 orang, informan biasa (IB) yaitu para Manager dibawah *Divisi Operation* sebanyak 3 orang, dan informan pendukung (IP) yaitu personel lapangan masing-masing area kegiatan usaha PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebanyak 3 orang.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang penerapan di rumah sakit. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait keselamatan pertambangan dan catatan atau rekaman terkait Keselamatan Pertambangan

Analisa data pada penelitian ini dimulai dari reduksi data yang merupakan bagian dalam Evaluasi data kualitatif dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemfokusan dari semua jenis informasi yang mendukung pada data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data dilapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus menerus ketika penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji. Kemudian penyajian data yang merupakan suatu rakitan informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dengan mengambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Elemen 1 Kebijakan

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan, menyusun kebijakan Keselamatan Pertambangan dengan visi, misi, tujuan, dan komitmen yang diturunkan menjadi program kerja. Kebijakan tersebut telah ditetapkan secara tertulis dan disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Meskipun telah dilakukan komunikasi kebijakan menggunakan bahasa yang dipahami pekerja melalui media seperti papan pengumuman dan safety talk, belum ada evaluasi ketersediaan informasi kepada seluruh departemen. PT Pesona Khatulistiwa Nusantara juga melakukan tinjauan kebijakan secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan, termasuk peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.



Gambar 1. Kebijakan LKP PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
Sumber: PT Pesona Khatulistiwa Nusantara 2021

Elemen 2 Perencanaan

Penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan pada elemen 2 perencanaan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara belum sepenuhnya memenuhi beberapa persyaratan. Meskipun telah dilakukan penelaahan awal terhadap ketaatan peraturan K3 dan KO, belum sesuai dengan kondisi dan program Keselamatan Pertambangan yang ditetapkan. Komunikasi dan konsultasi risiko baru melibatkan sebagian pemangku kepentingan, belum mengidentifikasi faktor internal dan eksternal secara keseluruhan, serta belum mengidentifikasi semua sumber, tindakan, dan kondisi yang dapat menimbulkan bahaya. Implementasi langkah-langkah pengendalian risiko belum sepenuhnya dilakukan, demikian juga pemantauan dan peninjauan risiko yang belum dilakukan secara periodik atau saat terjadi kecelakaan. Meskipun telah ada identifikasi dan pemantauan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, pemenuhan belum mencapai 100% dari daftar peraturan dan persyaratan yang ada. Program keselamatan juga belum mempertimbangkan hasil laporan penyelidikan insiden secara spesifik, namun telah ada penetapan rencana kerja anggaran dan biaya yang disahkan oleh Menteri ESDM.



Gambar 2. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi risiko di area Port
Sumber: PT Pesona Khatulistiwa Nusantara 2022

Elemen 3 Organisasi dan Personel

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah melakukan beberapa langkah dalam penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, namun masih terdapat temuan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Perusahaan belum mengkomunikasikan perubahan struktur organisasi kepada seluruh pekerja dan pihak terkait, terdapat kekurangan dalam kompetensi dan sertifikasi pengawas operasional, tenaga teknis, dan sebagian anggota tim tanggap darurat. Selain itu, bagian keselamatan operasional belum melaksanakan tugasnya dengan optimal, terdapat kekurangan dalam tugas dan tanggung jawab personel non-staff, monitoring dan evaluasi program pelatihan belum dilakukan secara komprehensif, serta terdapat kelemahan dalam komunikasi dan dokumentasi informasi terkait keselamatan pertambangan. Dengan melakukan perbaikan dalam hal-hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas sistem manajemen keselamatan pertambangan dan memastikan keselamatan serta kesehatan kerja bagi seluruh pekerja yang terlibat.



Gambar 3. Pelaksanaan pelatihan Keselamatan Pertambangan
Sumber: PT Pesona Khatulistiwa Nusantara 2022

Gambaran Penerapan Elemen 4 Implementasi

Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, terdapat beberapa temuan penerapan elemen 4 (implementasi), seperti yang ditemukan pada Mine Plan Engineer yang belum menyusun daftar peralatan penambangan yang mencakup jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan dengan informasi unjuk kerja seperti Physical Availability (PA), Mechanical Availability (MA), Utilization of Availability (UA), dan effective utilization (EU). Kekurangan ini dapat menghambat pemahaman yang jelas tentang ketersediaan dan kinerja peralatan penambangan. Kemudian bagian Maintenance Section General Affair juga belum melaksanakan perawatan pengaman instalasi listrik yang memadai. Hal ini terlihat dari observasi instalasi kelistrikan dikantor CPP site SMO yang belum memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Keadaan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau kebakaran akibat kesalahan listrik.

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara memiliki Mitra Kerja (PT HCI) yang memasang instalasi Penyalur Petir di site AMO, namun tidak diawali dengan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. Tim ahli internal PT Pesona Khatulistiwa Nusantara yang ditugaskan sebagai penguji kelayakan juga belum memiliki kompetensi yang sesuai. Kekurangan ini mengurangi kehandalan instalasi penyalur petir dan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan atau kecelakaan akibat petir. Meskipun PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah menunjuk tenaga teknis yang kompeten, namun jumlahnya masih belum memadai. Misalnya, perusahaan belum memiliki juru ukur yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan. Kekurangan ini dapat berdampak pada ketelitian dan akurasi data terkait pengukuran di area pertambangan.

Selain itu, terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi prosedur terdokumentasi. Proses perubahan dan modifikasi perancangan belum diimplementasikan pada proyek upgrade primary crusher 1500 TPH di SMO, sehingga meningkatkan risiko keselamatan. Proses pembelian belum

konsisten melibatkan section SHS dalam memasukkan barang atau material yang terkait LK3. Evaluasi terhadap perusahaan jasa belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan hasil evaluasi tersebut belum memberikan umpan balik yang memadai. Pemeliharaan sarana dan prasarana emergency response belum dilakukan secara berkala, yang terlihat dari observasi di station ERT. Prosedur mengenai penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan belum dijalankan dengan baik, seperti kurangnya pencatatan penggunaan isi kotak P3K di Kantor Tambang SMO.

Meskipun PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah melakukan komunikasi mengenai keselamatan di luar pekerjaan kepada semua pekerja dan keluarganya, masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program keselamatan di luar pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara perlu mengambil tindakan perbaikan yang tepat untuk mengatasi temuan-temuan ini. Dengan melakukan perbaikan yang spesifik dan menyeluruh, perusahaan dapat mencapai lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan keselamatan semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan pertambangan.

Elemen 5 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah memiliki prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan kerja, kesehatan kerja, keselamatan operasi, inspeksi, kepatuhan, penanganan kecelakaan, pengelolaan buku tambang, buku daftar kecelakaan



Gambar 4. Pelaksanaan pengujian kelayakan *Dump Truck*



Gambar 5. Pelaksanaan Evaluasi hasil *Medical Check Up* Karyawan

tambang, pelaporan, pemenuhan kompetensi, audit internal, dan tindak lanjut. Namun, evaluasi menunjukkan beberapa kekurangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kajian TSP secara berkala, tidak ditetapkannya rencana tindak lanjut dan perbaikan, tidak dilaksanakannya seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan, tidak dilibatkannya tenaga teknis yang kompeten dalam pengujian kelayakan peralatan, hasil inspeksi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, belum adanya rencana dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan evaluasi kepatuhan, dan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam penanganan kecelakaan dan tim investigasi kecelakaan. Diperlukan tindakan perbaikan yang tepat guna meningkatkan implementasi pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam sistem manajemen keselamatan pertambangan di perusahaan.

Elemen 6 Dokumentasi

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara telah memiliki manual SMLKP yang mencakup interaksi elemen-elemen dalam SMKPT Minerba, namun manual ini belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada departemen terkait dan belum konsisten digunakan dalam penyusunan dokumen level selanjutnya. Selain itu, dalam pembuatan dokumen Engineering di Workshop, standar format dokumen yang telah ditentukan oleh Management & Organizational Development belum sepenuhnya diikuti. Proses pengendalian rekaman juga belum diterapkan secara konsisten oleh pekerja, dan jenis dokumen dan rekaman keselamatan pertambangan belum mencakup semua elemen yang ada di SMKPT Minerba. Analisis temuan-temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dokumentasi yang dapat mengurangi keefektifan dan kehandalan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengambil tindakan perbaikan untuk memperbaiki masalah ini, termasuk meningkatkan sosialisasi manual SMLKP, memastikan penggunaan standar format dokumen yang tepat, dan meningkatkan konsistensi dalam pengendalian rekaman serta melengkapi jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen-elemen SMKPT Minerba.

Elemen 7 Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja

Meskipun tinjauan manajemen telah dilakukan, pelaksanaannya belum melibatkan pimpinan tertinggi perusahaan dan belum dilakukan secara terencana. Catatan hasil tinjauan manajemen telah didokumentasikan, namun masukan tinjauan manajemen belum mencakup semua masukan yang sesuai dengan persyaratan. Keluaran dari tinjauan manajemen belum sepenuhnya menghasilkan keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan efektivitas sistem manajemen dan peningkatan proses dalam elemen-elemen SMKPT. Hasil tinjauan manajemen telah dicatat dan didokumentasikan, namun belum dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.



Gambar 5. Dokumen Manual SMLKP

Meskipun telah dilakukan peningkatan kinerja dalam menghadapi perubahan peraturan, tuntutan pemangku kepentingan, perubahan bisnis, perubahan struktur organisasi, perkembangan teknologi, dan hasil kajian kecelakaan, tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan belum digunakan sebagai dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas tinjauan manajemen, perlu melibatkan pimpinan perusahaan, melakukan tinjauan secara terencana, memperluas cakupan masukan tinjauan, menghasilkan keputusan dan tindakan yang relevan, serta berkomunikasi secara efektif mengenai hasil tinjauan manajemen kepada pihak yang terkait.



Gambar 6. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara belum sempurna dilakukan berdasarkan KepDirJen Minerba Kementerian ESDM Nomor 185.K/37.04/DJB/2019, masih terdapat beberapa elemen yang belum terlaksana atau bahkan masih dalam proses dan belum berjalan, sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

References

1. Firdaus, F. (2021). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT Djava Berkah Mineral. *Jurnal Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 10(2), 75-85.
2. Pratama, R. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT Satria Bahana Sarana. *Jurnal Teknik Pertambangan*, 18(1), 45-58.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Keputusan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan Dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral

Dan Batubara.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
8. Salminen, R., & Löyttyniemi, A. (2019). Occupational Health and Safety Management Systems in Mining: A Review. *Safety Science*, 113, 71-79.
9. Pramono, R., & Kumara, A. (2018). Analysis of Occupational Safety and Health Management System Implementation in the Indonesian Mining Industry. *Safety Science*, 109, 1-10.
10. Australian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM). (2018). Guidelines for the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems in the Mining Industry.